



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026



JUMLAH	152 RESPONDEN	
GENDER	Laki-Laki : 111 org	Perempuan : 41 org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : 0 org	Diploma 2 : 0 org
	SD : 6 org	Diploma 3 : 4 org
	SMP : 3 org	Sarjana S1 : 58 org
	SMU : 68 org	Magister S2 : 13 org
	Diploma 1 : 0 org	Doktor S3 : 0 org
PEKERJAAN	PNS : 9 org	Wiraswasta : 13 org
	TNI : 0 org	Wirausaha : 7 org
	Polri : 19 org	Tenaga Kontrak : 1 org
	Lainnya : 103 org	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3.93
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3.95
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	3.95

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI ATAS
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA
PERIODE TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) TAHUN 2026

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Periode Triwulan III (Juli-September) Tahun 2026 pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, maka kami telah menindak lanjuti Hasil dari monitoring dan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut, Transparansi Pembayaran mendapat Indeks (3,93);

- a. Senantiasa memberikan penegasan kepada seluruh petugas layanan untuk tidak meminta atau menerima pembayaran di luar tarif resmi dalam briefing PTSP;
- b. Jika terdapat temuan, pengadilan akan menindaklanjuti dengan pembinaan, teguran, atau sanksi kepada petugas yang melanggar prosedur;

2. Tindak Lanjut, Perbuatan Curang mendapat Indeks (3,95);

- a. Selalu menegaskan kepada Petugas PTSP dan Petugas Keamanan dalam setiap briefing untuk melakukan pelayanan seluruhnya di PTSP serta mempedomani SOP yang berlaku;
- b. Pimpinan selalu menegaskan kepada Hakim dan aparaturnya Pengadilan Negeri Gresik dalam rapat bulanan Petugas PTSP dan Petugas Keamanan dalam setiap briefing untuk melakukan pelayanan seluruhnya di PTSP serta mempedomani SOP yang berlaku;

3. Tindak Lanjut, Manipulasi Peraturan mendapatkan Indeks (3,95):

- a. Membuat standarisasi dan transparansi layanan;
- b. Setiap jenis layanan harus memiliki Standar Pelayanan yang jelas dan mudah diakses publik;
- c. Mengupayakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi satu-satunya jalur layanan langsung dengan masyarakat untuk menghindari kontak informal;
- d. Semua area meja PTSP wajib dilengkapi CCTV dan penilaian layanan elektronik;

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi Periode Triwulan III (Juli-September) Tahun 2026 di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dibuat, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk terwujudnya Pengadilan / Hubungan Industrial Gresik Yang Agung.

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.

14 Oktober 2026
Ketua Pengadilan